

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU UNTUK  
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN  
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik**



**OLEH:**

**LIDIA LEKA METI  
NIM. 2016210097**

**KONSENTRASI MANAJEMEN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

Peran Pemerintah Dispenduk Capil Batu yaitu demi mengembangkan kesadaran warga Kota Batu untuk melakukan pembuatan akta kelahiran. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tersebut adalah masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami alur prosedur baik itu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan kelahiran dan kematian. Dalam penelitian ini tujuannya yaitu; (1) Untuk mendefinisikan dalam mengkaji karakter Pemerintah Dispenduk Capil Kota Batu, (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Dispenduk Capil Batu. Peneliti ini memakai metode studi kepustakaan, dan teknik mengumpulkan data dengan studi literatur yaitu tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, website yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

Peran Pemerintah Dispenduk Capil Batu sudah cukup baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Dispenduk Capil Batu telah berperan aktif, partisipatif, simpati dengan masyarakat, pemastian proses, pemahaman tata cara pelayanan, pengurangan persyaratan pelayanan dan efektifitas penanganan keluhan. Adapun hal tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah, baik itu dalam memberikan pelayanan gratis dalam mengurus dokumen kependudukan untuk meringankan biaya pengeluaran kepada masyarakat, dan adapun juga pemerintah mengadakan penyuluhan hukum dilaksanakan setiap ada kegiatan warga baik itu kegiatan formal maupun informal.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah Dispenduk Capil, Kesadaran Masyarakat, Akta Kelahiran.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi memiliki kewenangan dalam mengelola tempat tinggal masing-masing yaitu melalui pemerintahan sendiri. Untuk melaksanakan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah dipimpin kepala daerah dan dibantu dengan organisasi perangkat daerah (OPD). OPD bertugas membantu menjalankan kebijakan dan melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Fasilitas yang di berikan pemerintah oleh masyarakat yaitu bantuan dalam memberikan dukungan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Pengurusan menjalankan tugasnya merupakan penunjuk terpenting di dalam peningkatan kapasitas Negara, sampai pada tingkat pemerintahan maupun kabupaten. Pengelolaan penguasa di katakana memuaskan apa bila bantuan yang di buat mengarah atas kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu OPD yang ada di setiap daerah adalah Pemerintah Dispenduk Capil Batu yang memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan Pemerintah daerah yang berdasarkan asas otonomi dan kewajiban pembantuan di bidang Administrasi beserta dengan perintah yang diberikan kepada daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Dispenduk Capil Batu adalah Lembaga perangkat daerah (LPG) bagian penyelenggara urusan penguasa pada bidang Administrasi. Lembaga pemerintah daerah di pimpin oleh direktur yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada anggota kabinet dalam negeri melalui wali kota yang berkewajiban dalam melakukan bagian Administrator Di Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil. Salah satu kewajiban serta kewenangan Pemerintah Dispenduk Capil adalah memberikan pelayanan akta. Begitu juga dengan Pemerintah Dispenduk Capil Batu memiliki kedudukan sebagai elemen penyelenggara Pemerintah Daerah Di Bidang Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Bersumber pada Peraturan Pemerintah kabupaten Kota Batu, pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Administrasi Kependudukan, yang artinya melalui tata laksana penguasaan yaitu hubungan tindakan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan penduduk, pengelolaan informasi administrasi serta pendayagunaan halnya bagi pelayanan publik. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Pemerintah yang memiliki

kewajiban dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Salah satu kewajiban dan hak pemerintah Dispenduk Capil Batu yaitu melakukan bantuan atau pelayanan dokumen. Dokumen yaitu bukti atau sebuah keterangan yang harus di sediakan oleh setiap orang, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu dalam pengadaannya. Permasalahan yang ada selama ini adalah banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen ini karena dianggap sepele dan masyarakat sedang menggunakan kebutuhan dasar artinya lakukan ketika membutuhkan sehingga masyarakat tidak ingin membuat.

Permasalahan ini juga dialami oleh warga Kota Batu, masih banyak yang tidak memiliki dukumen akta kelahiran. Adanya data yang mendapati bahwa baru 40% warga Kota Batu yang sudah memiliki akta kelahiran. Padahal total penduduk warga Kota Batu jumlahnya 203.217 orang, ” <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/12/08>”. Oleh karena itu, Pemerintah Dispenduk Capil Batu terus mengencangkan sosialisasi pendaftaran online. Data kelahiran dan kematian di Dispenduk Capil Kota Batu, warga yang tidak memiliki dukumen kelahiran ini tersebar sekitar usia 0 bulan sampai usia maksimal atau lanjut usia. Untuk usia 0 bulan sampai 18 tahun, baru 87% yang memiliki akta kelahiran.

Bersumber pada Peraturan anggota kabinet daerah republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, mengenai percepatan pengembangan jangkauan hak dokumen kelahiran menegaskan bahwa: a) Pada dasarnya Negara bertanggung jawab untuk mewariskan pemeliharaan atas hak anak yang berpengaruh didalam wilayah pada luar Negara Indonesia berisi bentuk dokumen. b) pemilik dokumen kelahiran sebagai tanda bukti atas identitas anak yang masih menurun, kemudian perlu adanya untuk memiliki dokumen kelahiran. c). Menurut penilaian sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, harus menepatkan kebijakan menteri dalam negeri tentang percepatan pengembangan jangkauan pemilik dokumen kelahiran.

Melihat dari konteks permasalahan di atas, hingga penulis tertarik mengangkat pertanyaan dalam suatu pengkajian melalui judul tentang **“Peran Dispenduk Capil Kota Batu Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks di atas tersebut, maka kesimpulan soal penelitian yaitu:

1. Bagaimana peran Dispenduk Capil Batu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pelayanan dokumen kelahiran ?
2. Apa saja faktor yang menguasai peran Dispenduk Capil Batu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian dari pengkajian saat ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dispenduk Capil Batu untuk memajukan pemahaman masyarakat dalam memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui elemen yang membujuk karakter Dispenduk Capil Kota Batu benar-benar mengembangkan pemahaman masyarakat dalam pelayanan pembuatan Akta Kelahiran.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diinginkan dan boleh ditemukan pada hasil penelitian saat ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diinginkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pelayanan akta kelahiran.

2. Manfaat Praktis.

Dari hasil penelitian ini baik memperluas dasar informasi untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan pembuatan dokumen kelahiran oleh Dispenduk Capil Kota Batu

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Fitrah, M dan Luthfiyah. 2017. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mukarom Zainal, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Mulyadi, Dedi, 2018. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lofland, 2016. *Metode Pelitian Kuatitatif Dan Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Mukarom Zainal, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Rohman Abd, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, CV Cita Intrans Selaras Malang.
- Rohman Abd, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, CV Cita Intrans Selaras Malang.
- Sasmito Cahyo, 2020. *Sistem Administrasi Negara Indonesia (Kajian Teori Dan Praktek Di Era Pemerintahan Presiden Jokowi)*. UNITRI PRESS, MALANG.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kntitaf Dan Kualitatif*. Alfabeta, Bnadung.
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf Dan Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Terry, R George, 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*, CV Cita Intrans Malang.

### **Skripsi dan Jurnal:**

- Anggraini Rizky, 2015. *Kesadaran Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan*. Studi Pengurusan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang. <https://www.google.com>, d&q=Anggraini+Rizky. 28/2015. Kesadaran Masyarakat Dalam Administrasi Kependudukan.

- Firdausi Firman, Koli A Rajab Abdul. 2019, Volume 8, No. (4). *Efektivitas Pelayanan Publik Di Bidang Kependudukan Berbasis Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
- Fitri, Okta Afra Annisa. (2018), Volume 12, No. (2). *Peran Kinerja Pegawai Dalam Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Keahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang.
- Dini, 2017. *Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga*. Program Studi Ilmu Pemerinta <https://www.google.com>. Magang riset akta kelahiran Fakultas Ilmu Pemerintahan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fithriana Noora, Eva,Veronika. (2019).Volume 8, No. (3). *Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Adanya Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
- Kadir Abdul. (2019), Volume 3, No. (3). *Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hayat dan Laily Hidayahi, (2017). Volume 2, No. (1) *Mengoptimalisasikan Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran*. Universitas Islam Malang.
- Kadir Abdul, (2019. volume 3. No. 3.). *Kesadaran Huku Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif Legal Culture*. Sakina: Journal Of Family Studies.
- Veronika Eva, Noora Fithriana, (2019) Vol. 8, No. 3). *Upaya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dengan Adanya Mobil Keliling (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
- Pratama Nandha, dan Aulia Nimas. (2020), 14, No. (4). *Mengoptimalisasikan Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran*. Universitas Islam Malang.

Sasmito Cahyo, Ndia Viktoria, (2019). *Vol. 8, No. (2). Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Program 3 In1 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu).*

Selpianti, (2016). *Vol. 5, No.(2). Pelayanan Akta Kelahiran Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.*

Shandra Putu Ayu Dewa dan Wirda, (2019). *Vol. 8, No. 4. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi.*

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang no. 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang no. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

#### **Internet:**

Muklas. (2020), Maret 23). *Inovasi Terus Digalakkan Dispendukcapil Kota Batu, Mulai Mobil Senyum Hingga Pelampung Mosgun. Retrieved Maret 23, 2020, From. <https://jatimtimes.com/baca/210736/20200323/062000/inovasi-terus-digalakkan-dispendukcapil-kota-batu-mulai-mobil-senyum-hingga-pelampung-mosgun>.*

Putri. S. E. (2017, Desember Jumat, 8). *Baru 40 Persen Warga Kota Batu Punya Akte Kelahiran, Ini Sikap Pemkot dan Perangkat Desa. Retrieved Mei Senin, 29, 2017. <https://suryamalang.tribunnews.com/2017/12/08/baru-40-persen-warga-kota-batu-punya-akte-kelahiran-ini-sikap-dispendukcapil>.*